

.....  
**PENGARUH PROSOCIAL BEHAVIOR, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,  
 PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMITMEN ORGANISASI, DAN KEPEMIMPINAN  
 TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA**  
 .....

Oleh  
**Anjar Surdiyani<sup>1</sup>, Baldric Siregar<sup>2</sup>, Frasto Biyanto<sup>3</sup>, Miswanto<sup>4</sup>**  
<sup>1,2,3,4</sup>**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta**  
 Email: [1anjars832@gmail.com](mailto:1anjars832@gmail.com)

**Abstract**

*This research aims to test prosocial behavior, internal control system, community participation, organizational commitment, and leadership affect the accountability of village fund management. The population of this research is all village fund managers who are in 11 Village Governments in Panjatan District, Kulon Progo Regency, Special Region of Yogyakarta. The sampling method in this study used the saturated sampling method. The sample of this research is 88 respondents who are village officials involved in managing village funds as described in PERMENDAGRI No. 20 of 2018. The type of data in this study is quantitative data. The source of the data used in this research is primary data using the questionnaire method. The data analysis method used in this research are descriptive statistics, data quality test, and hypothesis testing. The results of this research indicate that prosocial behavior, internal control system, community participation, organizational commitment, and leadership have a significant effect on the accountability of village fund management.*

**Keywords: Behavior, Internal Control System, Participation, Commitment, Leadership, Accountability**

**PENDAHULUAN**

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan aset dan segala potensi yang dimilikinya. Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan asal-usul, adat istiadat, serta ide dan tanggungjawab dari masyarakat. Selain itu, desa mempunyai wewenang dalam mengontrol pemerintah serta kepentingan demi mengutamakan pembangunan desa serta tercapainya kemandirian desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menyampaikan perhatian lebih terhadap desa di Indonesia untuk secara mandiri melakukan pengelolaan alokasi dana desa. Menurut Putra

et al., (2017), pengelolaan alokasi dana desa tidak terlepas dari akuntabilitas.

Berdasarkan ketentuan pasal 24 huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa akuntabilitas mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas bagi desa dinilai sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Pengelolaan dana desa yang jauh dari akuntabel dapat membuka peluang pengelola untuk melakukan manipulasi. Hal tersebut mengharuskan pemerintah desa agar memperhatikan asas akuntabel demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel meliputi pengelolaan keuangan yang dapat di

pertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan keuangan desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di duga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *prosocial behavior*, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, dan kepemimpinan.

*Prosocial behavior* yang dimiliki oleh aparat pemerintah desa memegang peranan penting terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Menurut Bashori (2017), *prosocial behavior* dapat membantu meningkatkan *well being* orang lain, dikarenakan seseorang yang melakukan tindakan prososial turut mensejahterakan serta membahagiakan kehidupan orang lain. *Prosocial behavior* dalam hal ini berupa perbuatan yang bersifat menolong yang dilakukan individu tanpa mengharap sesuatu apapun.

Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang ditetapkan untuk digunakan dalam menjalankan program seperti pembentukan struktur dalam organisasi dan metode yang dibutuhkan untuk mengkoordinasikan kegiatan pemerintah. Sistem pengendalian internal dapat memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan pemerintah dapat berjalan dengan baik melalui kegiatan yang efektif dan efisien, melaporkan laporan keuangan secara andal, mengamankan aset serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang ditetapkan demi tercapainya tujuan. Sistem pengendalian internal diperlukan dalam mengelola dana desa untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa (Pahlawan et al., 2020).

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dana desa dapat menjadi kontrol kinerja pemerintah desa serta meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat diperlukan oleh aparat desa dalam membantu melaksanakan pengelolaan dana desa yang baik. Pengelolaan

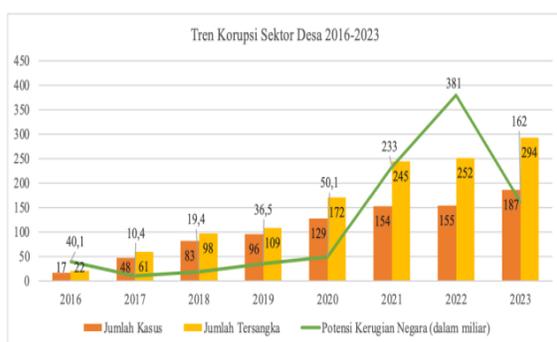
dana desa yang baik dapat tercapai apabila terdapat partisipasi masyarakat yang menyampaikan segala aspirasi serta berkontribusi dalam proses pengelolaan dana yang diperoleh (Umaira & Adnan, 2019).

Komitmen organisasi diperlukan untuk mendukung pengelolaan dana desa agar program-program desa dapat terlaksana dengan baik. Komitmen organisasi yang tinggi harus dimiliki oleh setiap aparatur pengelola dana desa untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen organisasi ditunjukkan dengan sejauh mana keberpihakan aparatur desa dalam memihak dan mempertahankan keanggotaan atas pemerintahan desa demi pencapaian tujuan (Martini, 2019).

Kepemimpinan yang berjalan dalam suatu organisasi menjadi salah satu penentu kesuksesan atau kegagalan dalam suatu organisasi tersebut. Pemimpin sangat dibutuhkan dalam organisasi karena pemimpin merupakan titik puncak dari suatu organisasi yang akan memotivasi dan mengarahkan bawahannya untuk sesuai dengan tujuan organisasi. Kepemimpinan dalam hal ini dapat berupa: 1) kepemimpinan suatu pemerintahan desa dalam memotivasi; 2) mengorganisasi; dan 3) mengarahkan para perangkat desa dalam menjalankan tugas pengelolaan desa (Setyowati et al., 2020).

Penelitian terkait pengelolaan dana desa masih layak untuk diteliti karena menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* kasus penyelewengan dana desa merupakan kasus korupsi tertinggi dari 10 besar kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2020 dengan urutan kasus korupsi berdasarkan sektor, yaitu: 1) anggaran desa; 2) pemerintahan; 3) transportasi; 4) perbankan; 5) pendidikan; 6) pertanahan; 7) kesehatan; 8) pajak; 9) pengairan; 10) sosial kemasyarakatan. Selain itu, menurut ICW dalam kasus penyelewengan dana desa pada setiap tahunnya masih mengalami peningkatan. Terdapat lonjakan jumlah kasus dan tersangka yang terjadi pada tahun 2023 dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya. Jika ditarik mundur sejak tahun 2016, peningkatan tersebut terjadi secara konsisten. Memang, jika dibandingkan dengan jumlah desa yang secara keseluruhan mencapai 75.265 desa. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menduga penyelewengan dana desa ini disebabkan oleh pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip akuntabilitas. Berikut grafik penindakan kasus korupsi berdasarkan sektor yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan kasus korupsi dari tahun 2016 hingga 2023:



**Gambar 1. Tren korupsi Sektor Desa (2016-2023)**

Sumber: [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org) data *Indonesia Corruption Watch*

Kapanewon Panjatan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 11 desa. Kapanaweon Panjatan Kabupaten Kulon Progo menjadi tempat penelitian karena lokasi tersebut berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal tersebut disebabkan karena menurut Laporan Inspektorat Kabupaten Kulon Progo masih banyak terjadi pelanggaran dalam alokasi dana desa. Pelanggaran alokasi dana desa yang ditemukan antara lain: 1) bendahara pengeluaran belum membuat laporan pertanggungjawaban; 2) penggunaan anggaran kurang tepat sasaran; 3) masih ditemukannya penggunaan pribadi dana APBDes; 4) penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tidak tepat waktu; 5) minimnya keterlibatan masyarakat dalam

pembangunan desa; 6) minimnya informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait hasil laporan pengeluaran kas desa; 7) dan minimnya transparansi terkait sistem pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Puspa & Prasetyo, 2020) mengenai pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengganti variabel kompetensi pemerintah desa menjadi *prosocial behavior*, mengganti variabel aksesibilitas laporan keuangan menjadi kepemimpinan serta menambah variabel partisipasi masyarakat, dan komitmen organisasi. Variabel kompetensi pemerintah telah banyak diteliti ulang dan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Widyatama et al., 2017) dan (Sweetenia et al., 2019) menyatakan bahwa kompetensi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga peneliti menggantikannya dengan variabel *prosocial behavior* yang berfokus pada sikap saling menolong yang dimiliki oleh aparat desa demi tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Menurut (Purba & Ramadhani, 2021) *prosocial behavior* yang dimiliki setiap individu akan berdampak pada tingkat pencapaian tujuan program-program suatu organisasi. Selanjutnya, variabel aksesibilitas laporan keuangan digantikan oleh variabel kepemimpinan dikarenakan terdapat penelitian terdahulu yaitu penelitian (Azizah et al., 2015) dan (Putri & Mujiyanti, 2021) konsisten menyatakan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kepemimpinan di suatu desa menjadi faktor penting karena desa yang baik berawal dari adanya pemimpin yang baik pula (Wardani et al., 2019). Selanjutnya, variabel partisipasi masyarakat juga diduga

berhubungan dengan akuntabilitas. Menurut (Indraswari & Rahayu, 2021) keterlibatan masyarakat akan berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah serta dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Selain *prosocial behavior*, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat, komitmen organisasi juga diduga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut (Suryani, 2021) aparat yang memiliki komitmen terhadap organisasinya (desa) akan menyusun kejelasan sasaran anggaran secara jelas sesuai dengan tujuan dari visi misi desa yang ingin dicapai, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja dalam organisasi desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian **“Pengaruh *Prosocial Behavior*, Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi, dan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”**.

## LANDASAN TEORI

### Teori *Agency*

Menurut (Anwar & Syamsu, 2021) teori agensi menjelaskan mengenai hubungan antara pemberi wewenang (prinsipal) dengan pihak yang diberi wewenang (agen). Dalam hal ini perangkat desa selaku golongan yang berhak (agen) dan pemerintah pusat dan daerah serta rakyat (prinsipal) untuk mengurus keuangan desa. Sebagai *principal*, masyarakat berusaha melakukan kontrol atau pengawasan terhadap perangkat desa dengan berpartisipasi dalam mengelola dana desa sebaik mungkin.

Teori agensi adalah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah memberikan penjelasan tentang adanya

hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban bagi pemegang amanah/*agent*/kepala desa dan aparatnya dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala bentuk aktivitas dan kegiatan. Pengungkapan dalam bentuk aktivitas dan kegiatan ini akan menjadi sebuah tanggung jawab yang akan diberikan kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang mana memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam penelitian ini, teori keagenan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa atas dana desa yang dikelolanya apakah sudah sesuai dengan sasaran anggaran dari pemerintah pusat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

### Teori *Stewardship*

Menurut teori *stewardship* mengansumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Pada teori ini pemerintah berperan sebagai *steward* yang tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi melainkan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Teori *stewardship* menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan. Kesuksesan pemerintah desa (*steward*) yang dinilai oleh *principal* menunjukkan bahwa pemerintah desa bekerja dengan mendahulukan kepentingan organisasi/ lembaga (Ika Asmawati & Prayitno Basuki, 2019).

Teori *stewardship* dalam penelitian ini menjelaskan keberadaan pemerintah desa (*steward*) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengerahkan segala keahlian dan kemampuannya dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat (*principal*).

### Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban dan untuk menjawab atau

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (Halwana'a et al., 2020). Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dinyatakan pula sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Pengelolaan dana desa adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan dilakukan oleh serangkaian kelompok orang yang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.

### **Prosocial Behavior**

*Prosocial behavior* merupakan suatu tindakan, sikap, dan nilai-nilai yang mendorong seseorang dengan memberi manfaat secara langsung bagi orang lain (Amseke & Panis, 2020). Selain itu, *prosocial behavior* dapat diartikan sebagai tindakan memberikan bantuan atau dirancang untuk membantu orang lain, terlepas dari motif orang yang memberikan pertolongan. Teori perilaku sosial menjelaskan *prosocial behavior* adalah perilaku menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan sebagai rasa tanggung jawabnya dalam bersosialisasi dengan masyarakat.

### **Sistem Pengendalian Internal**

Menurut Peraturan Pemerintah N0. 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu,

sistem pengendalian internal didefinisikan oleh AICPA (*American Institute Of Certified Public Accountants*) sebagai struktur suatu organisasi dan semua metode-metode terorganisasi untuk tujuan menjaga keamanan harta kekayaan, memeriksa ketetapan dan kebenaran data akuntansi, memeriksa ketepatan dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi kegiatan organisasi serta mendorong ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan.

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, serta keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Menurut Halwana'a et al., (2020), partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat baik secara mental maupun secara emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan yang bertujuan untuk mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penempatan kebijakan (keputusan) secara profesional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruhi oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan.

### **Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi adalah keadaan dimana karyawan atau pegawai sangat tertarik dengan tujuan, nilai-nilai, dan sasaran organisasi atau lembaganya yang meliputi sikap memiliki organisasi dan berusaha untuk mengupayakan secara maksimal untuk kepentingan demi tercapainya sasaran organisasi. Menurut Putu et al., (2016), rendahnya komitmen di dalam suatu organisasi menunjukkan kurangnya tanggungjawab seseorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Komitmen organisasi mencakup

adanya dorongan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi, rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban maupun keinginan untuk memajukan organisasi.

**Kepemimpinan**

Menurut (Hariana, 2018) kepemimpinan merupakan suatu kewenangan yang disertai kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan untuk menggerakkan orang-orang yang berada dibawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan suatu organisasi. Kepemimpinan telah dideskripsikan pula sebagai suatu tindakan memimpin, mempengaruhi, dan membimbing orang lain atau bawahannya untuk bekerjasama dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan, terdapat tindakan yang dilakukan oleh pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memberikan tugas kepada bawahannya agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efekti dan efisien.

**Penelitian Terdahulu**

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

N O	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Riandita et al., (2021)	<i>The effect of locus of control, prosocial behavior, village apparatus competence, and community participation on accountability of village fund management</i>	Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program Eviews versi 10	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa locus of control internal, perilaku prososial, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2	Wadi et al., (2020)	Pengaruh <i>prosocial behavior</i> terhadap	Dianalisis menggunakan analisis regresi linier	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

		akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa	berganda. Data diperoleh melalui distribusi kuesioner	<i>prosocial behavior</i> berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa
3	Sumadi (2021)	Pengaruh sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Data diperoleh melalui distribusi kuesioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
4	Atiningsih (2023)	Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa	Data diperoleh dari penyebaran kuesioner, dan dianalisis dengan bantuan software SPSS versi 25.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
5	Shafira & Utami (2023)	Pengaruh komitmen organisasi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Data diperoleh dari distribusi kuesioner dan diolah regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 26	Hasil penelitian mengungkapk an bahwa komitmen organisasi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sumber: Penelitian Terdahulu

**Hubungan Prosocial Behavior Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

*Prosocial behavior* terjadi pada tingkat kedekatan antara individu. Aparat pemerintah desa pada umumnya berasal dari desanya sendiri. Hal tersebut berkaitan dengan seseorang dalam budaya akan lebih senang menolong orang lain yang termasuk dalam kelompoknya dibanding dengan seseorang yang bukan dari kelompoknya. Di duga faktor perilaku aparat pemerintah desa menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan

memegang peranan penting terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa (Mahayani, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Wadi et al (2020), menyatakan bahwa *prosocial behavior* berpengaruh terhadap akuntabilitas. Berdasarkan riset diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>:** *Prosocial behavior* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### **Hubungan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Sistem pengendalian internal merupakan sebuah bentuk usaha dan kegiatan yang dikerjakan oleh seluruh bagian organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi sesuai prinsip *value for money* yang dapat berdampak pada akuntabilitas. Penerapan sistem pengendalian internal dapat memberikan keyakinan memadai terhadap proses penyelenggaraan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan perundang-undangan sehingga memenuhi kriteria akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Mashruhin & Kaukab (2019), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Kharisma & Widajantie (2021), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan beberapa riset diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>:** Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### **Hubungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Masyarakat merupakan unsur terpenting dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin baik

ke depannya. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula. Penelitian yang dilakukan Dewi & Gayatri (2019), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi, maka diduga akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat. Berdasarkan beberapa riset diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>:** Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### **Hubungan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel merupakan wujud komitmen aparatur desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa. Komitmen organisasi harus dimiliki oleh setiap aparat desa, sehingga komitmen atau rasa memiliki organisasi akan mendorong aparat desa dalam melakukan yang terbaik bagi organisasi desa tersebut. Penelitian yang dilakukan Medianti (2018), menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018), yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Komitmen organisasi yang tinggi diduga akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga akan mendorong keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Berdasarkan beberapa riset diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>:** Komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

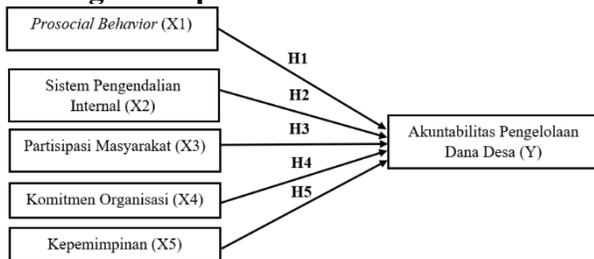
### **Hubungan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas dari pengelolaan dana desa dapat terwujud dengan adanya kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu pemimpin yang mampu menerima aspirasi masyarakat untuk perkembangan

desanya melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan keamanan, peningkatan pendidikan, pemenuhan kebutuhan hidup dan sebagainya dengan menggunakan dana desa yang segalanya dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan APBDES. Penelitian yang dilakukan oleh Nafsiah & Diana (2020), menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Buharuddin et al., (2020), yang menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas. Keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari peran orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut yang bersama membentuk sistem sehingga pola kepemimpinan pemerintahan desa dapat berpengaruh dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan beberapa riset diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>5</sub>:** Kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

**Kerangka Berpikir**



**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

**METODE PENELITIAN**

**Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola dana desa dari 11 Pemerintah Desa yang berada di Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan aparaturnya desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

yaitu aparaturnya pemerintah desa yang menduduki jabatan: 1) Kepala desa; 2) Sekretaris desa; 3) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum; 4) Kepala urusan perencanaan; 5) Kepala Seksi Pemerintahan; 6) Kepala Seksi Kesejahteraan; 7) Kepala Seksi Pelayanan; dan 8) Kaur keuangan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jumlah kuesioner yang di sebar se Kapanewon Panjatan sebagai target responden berjumlah 88. Tingkat pengembalian kuesioner adalah 84,09%. Dari 88 kuesioner yang diberikan pada responden, 74 buah kuesioner dapat kembali, 74 buah kuesioner tersebut dapat diolah serta 14 buah kuesioner tidak kembali. Secara ringkas deskripsi tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Data Distribusi Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner Yang Disebar	88	100%
Kuesioner Yang Kembali	74	84,09%
Kuesioner Tidak Kembali	14	15,91%
<b>Kuesioner Yang Dapat Diolah</b>	<b>74</b>	<b>84,09%</b>

Sumber: Data primer diolah, 2025

**Hasil Uji Validitas**

Hasil uji validitas pada variabel prosocial behavior, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, kepemimpinan, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa setiap instrumen yang digunakan memiliki nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap instrumen pada variabel prosocial behavior, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, kepemimpinan, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang digunakan adalah valid karena memiliki tingkat signifikansi <0,05. Hasil uji validitas tersebut menunjukkan bahwa setiap

pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini dapat digunakan sebagai alat ukur.

### Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
<i>Prosocial Behavior</i> (X1)	0,857	Reliabel
Sistem Pengendalian Intenal (X2)	0,770	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X3)	0,710	Reliabel
Komitmen Organisasi (X4)	0,702	Reliabel
Kepemimpinan (X5)	0,771	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,728	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* masing-masing variabel menunjukkan angka lebih besar dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa *prosocial behavior*, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, kepemimpinan, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dikatakan reliabel sebagai alat ukur variabel.

### Pengujian Hipotesis

Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	T	Sig	Hasil
<i>Prosocial Behavior</i>	0,093	2,286	0,025	H1 didukung
Sistem Pengendalian Internal	0,271	2,704	0,009	H2 didukung
Partisipasi Masyarakat	0,352	2,107	0,039	H3 didukung
Komitmen Organisasi	0,239	2,694	0,009	H4 didukung
Kepemimpinan	0,174	2,038	0,045	H5 didukung

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4 diatas, *variabel prosocial behavior*, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, dan kepemimpinan masing-masing menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,025;0,009;0,039;0,009;dan 0,045 yaitu lebih kecil dari 0,05% yang berarti bahwa seluruh variabel tersebut menunjukkan hasil yang signifikan.

### Pembahasan

#### Pengaruh *Prosocial Behavior* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil hipotesis pertama ( $H_1$ ) menunjukkan nilai t sebesar 2,286 dengan nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0,093 dan nilai signifikansi sebesar  $0,025 < 0,05$  yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel *prosocial behavior* dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wadi et al., 2020) yang menjelaskan bahwa *prosocial behavior* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teori perilaku sosial menjelaskan *prosocial behavior* sebagai perilaku menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Hal tersebut sejalan dengan teori norma tanggungjawab sosial yang mengungkapkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kewajiban untuk menolong sesama (Mahayani, 2017). Hal tersebut berkaitan dengan perilaku sosial pemerintah desa akan memberikan dampak terhadap terciptanya akuntabilitas.

#### Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil hipotesis kedua ( $H_2$ ) menunjukkan nilai t yaitu sebesar 2,704 dengan nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0,352 dan nilai signifikansi sebesar  $0,009 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan antara variabel sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aziiz (2019), dan Arfiansyah

(2020), yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teori *agency* menjelaskan bahwa agen akan memiliki informasi lebih banyak dibandingkan *principal* sehingga terdapat kemungkinan adanya informasi yang disembunyikan. Hal tersebut mengharuskan pemerintah desa memperkuat sistem pengendalian internal untuk meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal suatu pemerintah yang baik akan berdampak pada fungsi dan tugas pemerintah yang dapat berjalan sesuai prinsip *value off money* yang kemudian dapat meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah atas program yang telah dijalankan.

#### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil hipotesis ketiga ( $H_3$ ) nilai  $t$  yaitu sebesar 2,107 dengan nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0,352 dan nilai signifikansi sebesar  $0,039 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan antara variabel partisipasi masyarakat dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rifai et al., (2021) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teori *agency* menyatakan bahwa rakyat adalah *principal* sedangkan pemerintah desa adalah *agent*, maka pemerintah desa lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dengan cara memberikan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah desa kepada masyarakat (Putra & Rasmini, 2019). Melibatkannya masyarakat dalam segala keputusan yang akan diambil oleh pemerintah desa terkait penyusunan dan penggunaan dana desa diharapkan akan mampu mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan dana desa serta dapat meningkatkan keterbukaan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan.

#### **Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil hipotesis keempat ( $H_4$ ) menunjukkan bahwa nilai  $t$  yaitu sebesar 2,694 dengan nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0,239 dan nilai signifikansi sebesar  $0,009 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan antara variabel komitmen organisasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli et al., (2020). Hal ini berkaitan dengan teori *stewardship* yaitu pihak yang dipercaya dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah aparatur desa. Aparatur desa yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukannya dalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan yang baik kepada publik serta mencapai pengelolaan anggaran yang efektif.

#### **Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil hipotesis kelima ( $H_5$ ) menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung yaitu sebesar 2,038 dengan nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0,174 dan nilai signifikansi sebesar  $0,009 < 0,045$  sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan antara kepemimpinan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nafsiah & Diana (2020), yang mengungkapkan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini berkaitan dengan teori kepatuhan yang menjelaskan bahwa pemimpin dituntut untuk patuh dan disiplin terhadap semua peraturan dalam hal mengelola dana desa sehingga pembuatan laporan keuangan yang sesuai, andal, relevan, mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam teori *agency* akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah perangkat desa sebagai pihak yang diberikan wewenang (*agent*) oleh pemerintah pusat dan daerah (*principal*) untuk mengelola dana desa serta perangkat desa yang dipilih merupakan orang yang berkompeten Hal tersebut sejalan

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Marlina et al., (2021), yang mengungkapkan bahwa semakin baik kepemimpinan dalam pemerintahan desa, maka akan semakin baik pula pertanggungjawaban kejelasan sasaran anggaran yang tepat untuk mensejahterakan masyarakat desa.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh prosocial behavior, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, dan kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pengelola dana desa dari 11 Pemerintah Desa yang berada di Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. *Prosocial behavior* berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian yaitu terkait kondisi penelitian yang dilakukan di masa pandemi covid-19 sehingga peneliti kesulitan dalam bertemu dengan beberapa responden untuk melakukan penjelasan isi kuesioner. Selain itu, peneliti tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan keterbatasan diatas, peneliti dapat memberikan saran bagi peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk menambah informasi yang relevan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amseke, F. V., & Panis, M. P. (2020). Peran perkembangan moral terhadap perilaku prososial remaja. *PSYCHE: Jurnal Psikologi*, 2(2), 103–115. <https://doi.org/10.36269/psyche.v2i2.210>
- [2] Anwar, & Syamsu, N. (2021). Kausalitas terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(1), 1124–1135. STIEM Bogaya
- [3] Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 68–82. Sekolah Tinggi Mulia Astuti.
- [4] Aulia, P. (2018). Pengaruh kompetensi aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten 50 kota. *Jom Feb*, 1(1), 1–15.
- [5] Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- [6] Azizah, N., -, J., & Setiawan, A. R. (2015). Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai determinan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

- daerah. *Journal of Research and Applications: Accounting and Management*, 1(2), 111. <https://doi.org/10.18382/jraam.v1i2.18>
- [7] Bashori, K. (2017). Menyemai perilaku prososial di sekolah. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 57–92. <https://doi.org/10.32533/01103.2017>
- [8] Burhanuddin, Syarifuddin, A., & Iqbal. (2020). Analisis kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. *Ilmiah Pascasarjana STIE YPUP*, 1(1), 48–54.
- [9] Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri. (2019). Faktor-faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269. Universitas Udayana.
- [10] Haluana'a, F. J., Nasution, I., & Batubara, B. M. (2020). Analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1), 46–52. Universitas Medan Area.
- [11] Hariana. (2018). Kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan fisik desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam. *JOM FISIP*, 3(2), 1–14.
- [12] Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- [13] Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(6), 4.
- [14] Kharisma, F. T., & Widajantie, T. D. (2021). Kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan TI dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus desa di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 40–44.
- [15] Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial behavior dan persepsi akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam konteks budaya tri hita karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2), 129–144. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i02.p07>
- [16] Marlina, E., Rahmayanti, S., & Putri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh kepemimpinan, kompetensi, teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Rakit Kulim. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 89–100. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517>
- [17] Martini, R. (2019). Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. Sriwijaya
- [18] Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa (Studi empiris pada perangkat desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130. Universitas Sains Jawa Tengah
- [19] Medianti, L. (2018). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparat dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variable pemodesari (Studi pada pemerintah desa di Kecamatan Bayat). *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 1–13.

- [20] Nafsiah, S. N., & Diana, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Indralaya. *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, 3(2), 104–112.
- [21] Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- [22] Purba, A. W. D., & Ramadhani, S. (2021). Perbedaan perilaku prososial ditinjau dari tipe kepribadian ekstrovert dan introvert pada organisasi berkah langit medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1372–1377. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.567>
- [23] Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- [24] Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- [25] Putra, Sirnawati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/SIak/article/view/12270>
- [26] Putri, & Mujiyanti. (2021). Determinan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(1), 1–15.
- [27] Putu, L., Indrayani, C., & Suwandana, I. G. M. (2016). Pengaruh keadilan organisasional terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasional pada karyawan. 5(6), 3589–3619.
- [28] Riandita, I. P., Wayan, I., & Wirasedana, P. (2021). The effect of locus of control, prosocial behavior, village apparatus competence, and community participation on accountability of village fund management. *International Journal of Management and Commerce Innovations*, 9(1), 262–273. [www.researchpublish.com](http://www.researchpublish.com)
- [29] Rifa'i, M., Jubertus, & Susanti, R. A. D. (2021). Pengaruh kompetensi , sistem pengendalian internal , kepatuhan pajak , dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 919–928.
- [30] Setyowati, E. S., Kaukab, M. E., & Romadhon. (2020). Antecedent akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Journal of Economic, Business and Engineering*, 2(1), 55–65.
- [31] Suryani, N. M. (2021). Kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 2011–2027. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p11>
- [32] Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 44–56.

- <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2752>
- [33] Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- [34] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (n.d.). <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-Undang-Undang-Nomor-6-Tahun-2014-tentang-Desa-1421724948.pdf>
- [35] Wadi, I., Furkan, L. M., & Rifa'i, A. (2020). Pengaruh norma subyektif, kinerja aparatur, kejelasan sasaran anggaran, prosocial behavior terhadap transparansi dan akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi*, 30(1), 101–114.
- [36] Wardani, P. L. I., Dewi, G. A. K. R. S., Prayudi, M. A., & Prodi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 2019. (2019). Pengaruh gaya kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan transparansi terhadap implementasi good village governance (Studi kasus pada desa di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(1).
- [37] Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>
- [38] Zulkifli, Sulaiman, Wahyudi, R., & Martini, R. (2020). Peran kompetensi, komitmen, dan partisipasi masyarakat bagi akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) Ke-6*, 6(2), 106–113.